ARTIKEL ORISINAL

CSR dan Pendanaan LSM di Yogyakarta

Dendy H. Nanda

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kerinci

This article aimed to describe how CSR funds play in the funding of NGOs in Indonesia. The flow of CSR funds from foreign companies to NGO engaged in the community is certainly raised the questions, seeing the very different spirit between corporate NGO. The corporation whose orientation is on financial gain, while the orientation of NGO is community empowerment and it is a non-profit institution. Therefore, we need to pay attention to the power-corporate relations in the NGO through the funding network. This research uses qualitative methods based on a critical paradigm. It was found that the Corporate Social Responsibility (CSR) is no longer merely an act of charity and the social kindnes of the company to its community, furthermore, it is already a business strategy. The knowledge and power of funds agencies has been "driving" the NGO in Indonesia through the limitation of issues which are in the forum of donors. In the end, the NGOs in Indonesia have only become a capitalist tribes agency.

Keywords: corporate social responsibility, NGOs, power relations, panopticon, neocolonialism.

Tulisan ini ingin melihat bagaimana dana CSR bermain dalam dalam pendanaan LSM di Indonesia. Masuknya dana CSR dari perusahaan asing ke NGO yang bergerak di bidang kemasyarakatan tentunya sangat mengherankan, melihat semangat korporasi dan NGO sangatlah berbeda. Korporasi yang orientasinya pada keuntungan finansial, sementara LSM orientasinya adalah pemberdayaan masyarakat dan merupakan lembaga non-profit. Untuk itu kita perlu memperhatikan relasi-kuasa yang dilakukan korporasi pada NGO melalui jejaring pendanaan yang mereka salurkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersandar pada paradigma kritis. Ditemukan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi hanya sebatas tindakan amal dan kebaikan sosial dari perusahaan ke masyarakatnya, ia telah melangkah lebih jauh, yakni sudah menjadi strategi bisnis. Pengetahuan serta kuasa yang dimiliki oleh lembaga donor telah "menyetir" LSM yang ada di Indonesia melalui pembatasan isu yang di wacanakan oleh lembaga donor. Pada akhirnya LSM yang ada di Indonesia hanya menjadi perpanjangantangan dari kaum-kaum kapitalis.

Kata Kunci: *corporate social responsibility*, LSM, relasi kuasa, ponopticon, neokolonialisme.

Awal mula perkembangan *Corporate Social Resposibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan terjadi sekitar tahun 1900-an yang didasari konsep kekayaan di Amerika Serikat. Pencetusnya yaitu pengusaha yang memiliki perusahaan US Steel, Andrew Carnegie. Carnagie mengatakan bahwa bisnis dapat mendatangkan kekayaan dari sumber-sumber milik masyarakat, dan mengembalikan sebagian besar hasilnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri (Poerwanto, 2010, h. 17). CSR perusahaan merupakan tindakan moral perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, dimanakah sisi moral dari kegiatan

Corresponding author: Dendy H. Nanda; e-mail: dendyhnanda@iainkerinci.ac.id

Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication Volume 1 Issue 1 2020 © The Author(s) 2020. Published by Department of Communication Science Universitas Brawijaya. All right reserved. For permissions, please e-mail: tuturlogi@ub.ac.id

CSR? Apakah dengan membantu korban akibat dari ulah atau kegiatan perusahaan mereka sendiri bisa dikatakan bermoral?

Menurut Milton Friedman sang teoris neoliberal dalam esainya *"The Social Responsibility Of Bisnis is To Increase Its Profits"*, tujuan utama CSR adalah untuk mencari keuntungan semata. Tugas perusahaan adalah mencetak uang sebanyak mungkin, perusahaan tidak perlu memikirkan tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya, tugasnya hanyalah melayani *consumer,* dan *costumer* menarik jasa dari produk dan jasa yang dihasilkan. CSR tidak lebih hanya sekedar sebagai strategi bisnis perusahaan dalam menjaga citra perusahaan (Widjaja & Pratama, 2008, h. 52).

Bahkan ditambahkan Akbar (2010), CSR merupakan alat bantu, agar kelompok yang sedang berada dalam tekanan ekonomi tidak menjadi gelap mata karena penderitaannya itu. Namun, tidak sedikit yang percaya bahwa CSR hanya satu bagian kecil dari upaya mewujudkan masyarakat dengan perbandingan kekayaan 20:80; suatu keadaan dimana seperlima dari keseluruhan populasi menguasai 80% kekayaan. CSR, menurut pandangan ini, hanyalah bagian dari suatu teknik bagaimana agar masyarakat menerima 20% kekayaan ekonomi tetap merasa nyaman, ketika 80% sumber daya ekonomi dikuasai oleh kelompok di luar mereka. Pada titik ini, kegiatan CSR seolah sebagai akal-akalan perusahan untuk mengembalikan citra perusahaan yang terkena kasus atau kritikan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Atau sebagai upaya pembentukan citra perusahaan di kalangan masyarakat untuk melegalkan perbuatan perusahaan mereka yang sebenarnya bermasalah. CSR merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengambil hati masyarakat agar bersimpati pada perusahaan. Dapat dianalogikan, CSR adalah obat penenang yang semu tetapi tidak menyebuhkan.

Belakangan, dana program CSR perusahaan (baik perusahaan asing maupun domestik) masuk ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organisation* (NGO). Menurut *Commons Dreams* (2005), pendanaan korporat ke LSM telah bertumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun ini (Jordan, dkk, 2009, h. 182). Data dari *Centre on Philathropy* pada tahun 2005 menyebutkan, donasi korporat Amerika Serikat ke lembaga amal dan yayasan-yayasan mencapai US$500 juta. (Jordan, dkk, 2009, h. 169).

Di Indonesia, misalnya, *Institute for Studies Multiculturale and Pluralisme (IMPULSE)* dan *Combine Resourch Indonesia (CRI)*, dua NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan politik masyarakat dan penelitian ini didanai oleh salah satu pelaku bisnis atau investor besar Amerika Serikat, George Soros. Dengan bertolak pada spirit peduli sosial, George Sorros membentuk "yayasan" *Open Society Institute. Open Society Institute* merupakan bagian dari pelembagaan semangat CSR. Dari *Open Society Institute* inilah, dana-dana CSR dikucurkan melalui lembaga *funding* di bawah asuhannya ke NGO-NGO di tanah air, seperti Yayasan Tifa.

Masuknya dana perusahaan asing ke LSM yang bergerak di bidang kemasyarakatan tentunya sangat mengherankan, melihat semangat korporasi dan LSM sangatlah berbeda. Korporasi yang orientasinya pada keuntungan finansial sangat kontras dengan NGO atau LSM. Menurut Jhon Locke, NGO merupakan bagian dari peradaban yang berada di luar kendali pemerintah dan pasar (*market*) (Widjajanto, 2007, h. 5). Orientasi NGO pada

pemberdayaan masyarakat dan merupakan lembaga non-profit. Sedangkan korporasi selalu dikaitkan dengan semangat akumulasi modal.

Menjadi menarik kemudian, memperhatikan relasi-kuasa yang dilakukan korporasi pada NGO melalui jejaring pendanaan yang mereka salurkan. Kuasa yang dimaksud di sini bukan siapa menguasai siapa, tetapi lebih pada strategi atau kepentingan yang ada di dalam relasi antara perusahaan dan LSM. Mengikuti pemikiran Foucault , kekuasaan tak harus tunggal atau diandaikan sebagai posisi tertentu yang rigid, tetapi juga berupa regulasi dan aturan-aturan main yang dibentuk seperti jejaring pendanaan korporasi pada LSM.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana relasi kuasa dalam jejaring pendanaan dan program LSM di Yogyakarta yang memamfaatkan dana CSR? Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat relasi kuasa yang terjadi antara donatur dan LSM yang pada konteks ini *founding* memamfaatkan dana CSR utuk kepentingan pendanaan LSM yang ada di Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersandar pada paradigma kritis yang mengacu pada Michael Foucault. Paradigma ini bertujuan untuk membuka, memindahkan dan membuang keyakinan-keyakinan serta ide-ide keliru tentang masyarakat dan realitas sosial serta ada ketertarikan pada hal-hal yang tersembunyi dan tidak menjadi kepedulian karena realitas yang dihalangi secara utuh (Audifax, 2008, h. 28-29). Penelitian dalam paradigma kritis harus dikaitkan dengan sebuah usaha untuk menentang ketidakadilan dalam suatu masyarakat tertentu atau kungkungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pada tradisi pemikiran kritik Foucault, mengundang para peneliti untuk menjelajah cara-cara yang melibatkan berbagai diskursus ke dalam relasi-relasi kekuasaan dan bagaimana pengetahuan secara dialektis bertindak selaku pemicu ulang praktik-praktik yang mengatur apa yang dipandang logis dan benar. (Denzin & Lincoln, 2009, h. 174).

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara dan observasi pada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta pada 2011-2013. Ada beberapa langkah dalam melakukan analisis data. Pertama, reduksi data, yaitu kegiatan memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi pola dan susunan yang lebih sederhana. Kedua, katagorisasi data, yaitu upaya memilah-milah hasil temuan penelitian kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Ketiga, Penyajian data, proses ini merupakan penyajian data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi dan katagorisasi data. Keempat, refleleksi teori, yaitu proses menguraikan temuan penelitian dengan teori yang berhubungan dengan penelitian. Terakhir, penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Mekanisme kerja dan relasi lembaga donor - LSM

Proses pengajuan rogram

Dalam proses pengajuan program, lembaga donor menggunakan beberapa cara penyampaian. Ada beberapa cara dalam proses penyampain program kerja. Pertama, pengumuman terbuka. Melalui pengumuman terbuka, LSM-LSM bisa bersaing secara bebas dalam mendapatkan dana dari lembaga donor. Semua LSM, baik yang sudah besar maupun LSM baru bebas berkompotisi mendapatkan program kerja dari lembaga donor. Pengumuman terbuka ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu, melalui media massa dan media *online*.

Kedua, sosialisasi terbatas. Sosialisasi terbatas bisa juga disebut pengumuman semi-terbuka. Dikatakan semi-terbuka karena pengumuman program kerja tidak dilakukan melalui media, melainkan dengan cara mengundang LSM-LSM tertentu. Lembaga donor secara sepihak mengundang LSM-LSM yang mereka percaya, biasanya LSM-LSM yang sudah pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya.

Ketiga, hubungan langsung. Hubungan langsung ini didasarkan atas pertemanan dan kepercayaan antara lembaga donor dan LSM. LSM dan lembaga donor sudah sangat dekat dan sering melakukan kerjasama program. Jadi memungkinkan untuk berhubungan secara langsung untuk penggarapan program kerja. Dalam proses hubungan langsung ini ada dua cara yang dilakukan. Pertama, lembaga donor menunjuk langsung satu LSM yang sudah dipercaya untuk menjalankan program kerja. Kedua, LSM mengajukan proposal kerja atau melobi lembaga donor.

Alasan/pertimbangan pemberian dana

Ada beberapa alasan dan pertimbanagn lembaga donor memberikan dana pada LSM. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan didasarkan atas beberapa syarat, diantaranya kinerja dan reputasi dari LSM, kapasitas lembaga dan popularias dari individu dalam suatu LSM.

Kedua, pertemanan dan rekomendasi, salah satu faktor lahirnya hubungan pertemanan antara LSM dan lembaga donor adalah rekomendasi. Baik itu rekomendasi antar sesama LSM maupun rekomendasi yang diminta lembaga donor. LSM pemula yang ingin mencari dana program kerja akan meminta rekomendasi dari LSM yang sudah penah mendapatkan dana dari lembaga donor. Sebaliknya, lembaga donor juga akan meminta kepada LSM yang sudah mereka kenal untuk dicarikan LSM baru yang sanggup mengerjakan program kerja mereka. Selain itu *track record* dari suatu LSM juga menetukan hubungan LSM dan lembaga donor.

Proses penentuan isu

Dalam dunia kerja LSM ada empat cara yang digunakan untuk menentukan isu kerja LSM. Pertama, Mewacanakan isu. Mewacanakan isu sepintas agak mirip dengan mengarahkan. Namun proses pengarahnya tidak dilakukan secara eksplisit. Pewacanaan isu oleh lembaga donor dilakukan dengan sangat sistematis yang kemudian sangat susah dimengerti oleh LSM. Sementara, pihak LSM hanya akan mencocokan atau mengaitkan agenda mereka dengan isu yang dibawa oleh lembaga donor. Isu yang dibangun melalui pewacanaan juga cendung sepihak.

Kedua, LSM mengusulkan atau mewacanakan isu. Tidak hanya lembaga pendonor yang mewacankan isu, LSM selaku penerima dana juga sering mengusulkan isu pada lembaga donor. LSM mengajukan proposal kerja kepada lembaga donor sesuai dengan isu bentukan mereka. Tentunya LSM yang sering atau bisa mewacanakan isu adalah LSM besar atau sudah dipercaya oleh lembaga donor.

Ketiga, Mengarahkan isu. Ketergantungan LSM yang begitu besar pada lembaga donor adalah penyebab dari leluasanya lembaga donor mengarahkan atau mendikte LSM. Mengarahkan atau mengatur isu maksudnya adalah capaian akhir atau hasil akhir dari suatu program kerja LSM sudah di desain oleh lembaga donor.

Keempat, kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga ini biasanya disebabkan oleh kejadian alam. Bencana alam dapat mengundang animo lembaga donor untuk menyalurkan bantuannya. Contoh nyata dari munculnya isu akibat kejadian tak terduga adalah ketika gempa Yogyakarta 2006 silam.

Proses monitoring dan evaluasi

Ada tiga jenis monitoring dan evaluasi (monev) yang terjadi pada dunia kerja LSM. Pertama, internal LSM, setiap LSM yang profesional akan melakukan proses monitoring dan evaluasi program kerja. Utusan dari LSM biasanya melakukan proses monev terhadap kerja dari lembaganya sendiri

Kedua, internal donor. Lembaga donor juga melakukan monitoring dan evaluasi. Lembaga donor memiliki orang yang bertugas untuk memonitoring dan evaluasi kerja LSM. Ada utusan dari lembaga donor yang ditugaskan untuk memantau kerja LSM. Lembaga donor akan memonitoring dan evaluasi LSM yang menjalankan program kerja mereka.

Ketiga, independen. monev independen adalah monev yang bekerja di luar lembaga donor dan LSM. Tidak adak keterikatan khusus antara monev independen dengan lembaga donor dan LSM. Monev independen punya lembaga khusus, meskipun perorangan, monev independen tidak punya ikatan dengan salah satu lembaga itu.

Sementara itu kegiatan monitoring dan evaluasi pada LSM terkosentrasi dalam tiga kegiatan. Pertama, keuangan. LSM, khususnya di Yogyakarta, sangat tergantung pada uang yang dihibahkan oleh lembaga donor. Menjadi wajar kemudian bila sebagian lembaga donor sangat ketat dalam melakukan kontrol terhadap uang, karena mereka yang membiayai program kerja yang dijalakan oleh LSM. Kedua, administrasi, banyak dari lembaga donor hanya melakukan monitoring dan evaluasi hanya sebatas administrasi, tidak pada apa yang dihasilkan. Ketiga, hasil yang dicapai. Walaupun tidak terlalu signifikan, hasil kerja adalah salah satu yang dimonitoring dan evaluasi. Hasil kerja dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, hasil kerja dari program kerja non fisik. Kedua, hasil program kerja fisik.

Relasi antar LSM

Relasi dalam dunia kerja LSM dilakukan dengan dua cara. Pertama, LSM senior/lama dan LSM baru. LSM baru punya startegi tersendiri dalam mencari dana untuk program kerja. Salah satunya dengan cara membangun relasi dengan LSM baru/senior. Hubungan yang terjadi antar LSM senior dan LSM baru dilakukan dengan cara menginduk atau berkoalisi dengan LSM senior. Hal ini terjadi karena LSM kecil sulit untuk mendapatkan dana. Selain itu, LSM kecil juga terkadang tidak mampu untuk mengelola program yang relatif besar.

Kedua, antar sesama LSM senior/besar. Persaingan terjadi antara sesama LSM besar yang sama-sama pernah menjalin kerja sama dengan lembaga donor. Dampak dari situasi seperti itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama LSM besar. Sehingga, ada sebagian LSM besar melakukan kanalisasi dana. Ada tiga cara LSM besar dalam melakukan kanalisasi pendanaan, yaitu kanalisasi isu, kanalisasi berkelompok, dan kanalisasi geografis.

Wacana: pengetahuan dan kekuasaan

Menurut Foucault wacana atau *discouse* merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan. Bisa juga dikatakan *enonce* (*statement*) atau pernyataan. Pernyataan di sini bukan merupakan suatu ungkapan atau proposisi. Foucault menghubungkan *speech act* dengan pernyataan. Pernyataan dan *speect act* hanya butuh diterima dengan begitu saja, dan menempatkan pernyataan dalam konteks aktual dengan jejaring pernyataan yang lain. *Speech act* menjadi pernyataan ketika seseorang menyusun dalam suatu prosedur validitas yang pasti, dalam komunitas para ahli, dan lain-lainnya yang kemudian mempunyai konsekuensi sosial yang serius (Santoso dkk, 2007, h. 171-172).

Bicara pada konteks dunia kerja LSM, lembaga donor memiliki otonomi dalam menentukan program kerja, karena faktanya yang memberi dana program kerja tersebut adalah lembaga donor. Lembaga donor sebagai suatu lembaga pemilik dana memiliki kewenangan dalam menentukan isu. Pernyataan atau bentuk wacana tertentu pada suatu isu tetentu akan menjadi sebuah pengetahuan. Isu yang diwacanakan oleh lembaga donor kemudian akan menjadi suatu pengetahuan yang kemudian disebarkan ke LSM-LSM yang ada di Yogyakarta.

Belum tentu paraktek diskursus itu tampak pada ilmuan-ilmuan paling besar dan paling orisinal, bisa saja regulasi diskursus itu tampak pada tokoh-tokoh biasa dan kurang orisinal (Berthens, 2006, h. 349). Dalam hal ini LSM memiliki kewenangan dalam membentuk isu. Walaupun kemudian isu yang di bangun LSM sesuai dengan isu yang sedang *tren*, dan bahkan isu yang diagendakan lembaga donor.

Menurut Foucault suatu diskursus memungkinkan untuk menjadi pengetahuan bila terjadi relasi antar pernyataan. Kemudian dia menyebutnya sebagai bentuk diskursif. Foucault juga menghubungkan kelompok-kelompok pernyataan dengan apa yang dia sebut sebagai *enunciative modalities*, yaitu suatu aturan atau hukum yang beroporasi dibelakang pernyataan yang bermacam-macam. Di antaranya berkaitkan dengan siapa yang mempunya hak untuk menyatakan pernyataan dan posisi apa yang ditempati subyek yang menyatakan pernyataan (Santoso dkk, 2007, h. 175).

Tentunya dalam hal ini lembaga donor memiliki cukup hak untuk menyatakan pernyataan dibandingkan dengan LSM. Lembaga donor memiliki kedudukan yang lebih "superior" dalam menentukan isu. Alasannya, lembaga donor yang memiliki uang untuk program kerja LSM. Uang adalah sesuatu yang sangat vital dalam dunia kerja LSM. Lembaga donor menempati posisi yang sangat strategis. Pengetahuan yang memadai tentang suatu isu tertentu memungkinkan lembaga dana untuk menebar pegelaran kuasa pada LSM.

Seperti diungkapkan Foucault, "kekuasaan membuat gila" namun kekuasaan itu menciptakaan dan melahirkan objek pengetahuan yang baru. Sebaliknya, pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan, kekuasaan tidak mungkin dijalankan, pengetahuan tidak mungkin tidak melahirkan kekuasaan (Sarup, 2008, h. 113). Pengetahuan yang dimiliki lembaga dana akan menciptakan kekuasaan pada LSM. Pengetahuan tentang isu yang dominan dan tidak seimbang antara LSM dan lembaga donor, pagelaran kuasa lembaga donor semakin memungkinkan terjadi.

Pola-pola hubungan antara LSM dan lembaga donor cenderung bersifat *top-down*. Mengingat yayasan cenderung menjadi organisasi yang hierarkis (Fakih, 2010: 156). Lembaga dana memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan visi, misi, maupu program LSM. Kerja sama yang seimbang antara lembaga donor dan LSM tidak memungkinkan terwujud karena hubungan yang tidak seimbang atara keduanya. Hubungan yang tidak seimbang tersebut diakibatkan oleh ketimpangan infrastruktur, pemahaman isu, dan kapasitas LSM. Sehingga lembaga donor mempunyai cukup ruang untuk "bermain" dalam pewacanan isu dari program kerja LSM yang kemudian diikuti dengan produksi kekuasaan. Lembaga donor menebar kekuasaan melalui pengetahuan. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada didalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kekuasaan memproduksi pengetahuan, bukan saja karena kuasa berguna bagi pengetahuaan, tetapi pengetahuaan menyediakan kuasa (Bertens, 2006, h. 355). Menurut Foucault tidak ada kuasa tanpa pengetahuan dan sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kuasa. Oleh sebab itu, pengetahuan tidak mungkin bersifat netral dan murni dan selalu bersifat politis (Foucault, 2006, h. 255).

Lembaga-lembaga dana memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan membentuk agenda kerja sama LSM. Banyak agenda LSM pada dasarnya ditentukan oleh lembaga donor. Salah satu jalan relasi lembaga donor dan LSM adala pada aspek penentuan isu atasnama demokratisasi. Semua kegiatan yang dilakukan lembaga donor di Yogyakarta selalu terkait dengan demokratisasi. Seperti keterbukaan informasi publik, pluralisme, masyarakat terbuka dan sebagainya, semua terkait demokratisasi.

Menurut Widjajanto (2007, h. 89), campur tangan lembaga donor dapat terjadi apabila para donor tersebut menganggap bahwa tanpa adanya bantuan dari mereka, suatu negara tidak akan menjadi negara yang sejati menerapkan nilai-nilai demokratisasi. Demokratisasi menjadi *tren* isu di kalangan dunia LSM. Lembaga donor selalu berbicara tentang demokratisasi. sementara, demokratisasi adalah bentuk lain dari moderenisme ala barat. Demokratisasi adalah roda ideologis yang menggerakkan kapitalisme, materelialisme dan modernitas (Fauzi, 2005, h. 12). LSM hanya menjadi perpanjangan tangan dari lembaga donor. Lembaga donor mengangkat dan menyebaran isu demokratisasi. LSM mengadopsi isu yang dibentuk lembaga donor. Ketergantungan yang sangat besar pada lembaga donor menyebabkan LSM menjalankan agenda isu dari lembaga donor atas nama demokratisasi. Sebaliknya, LSM sangat sulit memunculkan isu lain di luar agenda dari lembaga donor.

Panopticon: monitoring dan evaluasi sebagai pendisiplinan

Menurut Foucault, kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan dan represi, melainkan melalui jalan normalisasi dan regulasi (Bertens, 2006, h. 357). Begitu juga halnya pada dunia kerja LSM. Kuasa lembaga donor terhadap LSM tidak dilakukan melalui penindasan maupun pembatasan yang mengekang secara langsung. Justru sebaliknya, lembaga donor melakukan dengan cara positif dan produktif, yakni melalui monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini merupakan bentuk pemantauan dari lembaga donor untuk melihat program yang telah dijalankan berdasarkan skema pendanaan yang telah diberikan.

Namun disadari atau tidak, monitoring dan evaluasi itu merupakan bagian dari normalisasi. Lembaga donor melakukan monitoring dan evaluasi terhadap LSM untuk

normalisasi pekerjaan LSM. Menurut Bertens (2006, h. 357), untuk dapat mewujudkan normalisasi itu perlu dikembangkan suatu sistem kontrol yang amat kompleks. Normalisasi berfungsi sebagai alat penyaring dan penyortir agenda yang secara tidak langsung membatasi ruang lingkup pekerjaan LSM berdasarka agenda utama lembaga donor. Sementara pekerjaan hanya dimungkinkan karena proses normalisasi yang menjadikan manusia sebagai tenaga kerja.

Normalisasi dan regulasi tentu memiliki tujuan tertentu. Dalam buku yang berjudul *Menjaga dan Menghukum* (dalam Hardiyanta, 1997, h. 90), Foucault bercerita tentang normalisasi atas tubuh yang didisiplinkan. Tubuh yang sehat, kuat, energik sengaja dibentuk. Semua itu bertujuan utuk keberlangsungan proses produksi. Ketika tubuh pekerja sakit, lemah dan lemas maka dengan sendirinya proses produksi dalam sistem kerja kapitalisme akan tehambat. Tubuh yang kuat, atletis, dan sehat berguna untuk kepentingan produksi. Menurut Foucault, tidak mengherankan bahwa masyarakat kapitalis moderen gencar mempromosikan tubuh yang sehat sebagai ciri kebudayaan yang sentral dan kuat (Jones, 2009, h. 81).

Begitu juga halnya pada proses monitoring dan evaluasi kerja LSM. Lembaga donor melakukan normalisasi dan regulasi pada proses monev. Monitoring dan evaluasi berguna untuk pendisiplinan. Pekerja LSM akan bekerja sebaik mungkin, tidak keluar dari ketentuan lembaga donor. Dengan demikian LSM akan sendirinya disiplin, karena menurut Bertens (2006, h. 357), pekerjaan merupakan suatu cara untuk melatih dan menanamkan disiplin. Sementara disiplin merupakan teknik kuasa, bukan sebuah institusi (Santoso dkk, 2007, h. 183).

Kuasa disipliner merupakan sistem pengawasan yang dibatinkan sampai pada titik di mana setiap orang menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Proses mengawasi diri sendiri ini menurut Foucault disebut *Panopticon.* Masih dalam dalam bukunya yang berjudul *Dicsipline and Punish*, Foucault menggambarkan teknik *Panopticon*. Di sel-sel yang berbentuk melingkar, semua tahanan akan merasa diawasi dengan manara jaga sentral, kemudian secara bertahap tahanan akan mulai mengawasi perilaku mereka sendiri (dalam Sarup, 2008, h. 103).

Dengan monitoring dan evaluasi, para pekerja LSM secara tidak langsung dipantau, diawasi, dinilai, dan dikontrol oleh lembaga donor. Secara bertahap pekerja LSM akan mengawasi perilaku mereka sendiri. Menyesuaikan pelaporan program kerja mereka dengan ketentuan lembaga donor. LSM akan bekerja dengan sungguh-sunguh sesuai dengan aturan lembaga donor. Kemudian pihak LSM akan melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap diri mereka sendiri, yang kemudian dinamakan monev internal LSM.

LSM melakukan monitoring dan evaluasi internal. Utusan dari LSM akan melakukan kontrol terhadap pekerjaan individu yang bekerja di LSM itu sendiri. Masing-masing orang akan mengawasi kinerja mereka sendiri. LSM melakukan kontrol terhadap diri mereka sendiri, karena memang *panopticon* mengharapkan kontrol dari semua orang untuk semua orang. Suatu kontrol menyeluruh dan tak henti-hentinya (Bertens, 2006, h. 352). Baik kontrol dari lembaga donor maupun kontrol dari LSM sendiri selaku penerima dana dari lembaga donor.

Menurut Foucault, kombinasi kekuatan eksternal, pengaturan dan pengawasan seolah menjadi polisi internal terhadap diri sendiri. Itulah yang menjadikan wacana kekuasaan yang tak terbendung (Jones, 2009, h. 189). Sebagaimana tergambar dalam proses monitoring dan dan evaluasi kerja LSM. Lembaga donor dan LSM secara bersamaan melakukan kontrol atas program kerja LSM. Dengan adanya kegiatan monev kerja, LSM menjadi polisi atas dirinya sendiri. Pekerja LSM dikondisikan untuk mengawasi dirinya sendiri.

Cara kerja panopticon melalui monitoring dan evaluasi dapat menjadi alat pengawasan kerja LSM. Monitoring dan evaluasi mirip dengan sebuah teropong (*gaze*) yang ada di dalam penjara. Setiap teropong dimana setiap kerja orang tak lepas dari pemantaunya. Lembaga donor dapat melihat semua yang terjadi pada kerja LSM. Melalui monitoring dan evaluasi, lembaga donor dapat mengawasi kerja LSM secara keseluruhan. Menurut Sarup (2008, h. 104), kita dapat melihat kemiripan *panopticon* ("semua terlihat") dengan konsep maha tahu-Nya Tuhan. Semua pekerjaan LSM akan terlihat, terawasi, terkontrol melalui kuasa disiplin.

Dengan pendisiplinan kerja, LSM diharapkan dapat bekerja sebaik mungkin. Bekerja dengan cermat, teliti, agar tidak terjadi kesalahan. Apabila hasil yang diharapkan tidak sesuai harapan lembaga donor, maka akan berdampak pada reputasi LSM itu sendiri. *Panopticon* menciptakan subjek yang bertanggung jawab atas kedudukan dirinya sendiri (Sarup, 2008, h. 115). Kerja yang baik itu kemudian akan kembali pada lembaga donor selaku pemberi dana. Semua itu dikendalikan oleh lembaga donor. Lembaga donor punya hak pendisiplinan yang tak terbantahkan.

Menurut Foucault, melalui kuasa disiplin, memungkinkan suatu pekerjaan untuk dimanipulasi, ditundukkan, dimanfaatkan, ditransformasikan, dan diperbaiki (Santoso dkk, 2007, h. 183). Bukan tidak mungkin dalam monitoring dan evaluasi kerja LSM akan terjadi manipulasi dan pemanfaatan, karena lembaga donor menentukan aturan monev itu sendiri. Lembaga donor punya hak kuasa dalam memonitor dan evaluasi kerja LSM.

Kritik ideologi CSR

Sebelum berbicara masalah kritik idiologi dari *Corporate Social Responsbility* atau CSR ada baiknya kita mengingat kembali sejarah berdirinya CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan pada awalnya muncul akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungannya. Maka kemudian untuk menjawab persoalan tersebut dibentuklah suatu konsep yang kemudian di beri nama *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Widjaja & Pratama, 2008, h. 11). Dengan kekayaan perusahaan yang melimpah dari hasil eksplorasi kekayaan alam milik masyarakat, menurut pencetus konsep CSR, Andrew Carnagie, ada baiknya perusahaan mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat tersebut (Poerwanto, 2010, h. 17).

Namun seiring waktu serta dinamika perkembangan pasar global, banyak para pengusaha memainkan strategi CSR menjadi strategi bisnis. Menurut Fukuyama, kaum kapitalis dengan dongeng pasar bebasnya dan keuntungannya akan menimbulkan dampak negatif. Untuk itu harus ada kebijakan alternatif yang didasarkan atas kebijakan etis dan moral, baik pada individu maupun perusahaan. Maka konsep tentang CSR merupakan salah satu konsep yang relevan untuk mengatasi hal tersebut (Wahyudi & Azheri, 2008, h. xxii).

Selain itu campur tangan pemerintah dengan menggodok undang-undang tentang CSR juga memperkeruh CSR itu sendiri. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan bagi seluruh perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sebagaimana termaktub pada ayat 1 Pasal 74 berbunyi *"Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya"* (Widjaja dan Pratama, 2008, h. 93).

Dengan adanya undang-undang tentang pengaturan CSR, kini program CSR sudah menjadi tuntutan bagi perusahaan untuk beramal pada masyarakatnya. Secara tidak langsung, perusahaan tidak menjadikan CSR sebagai bentuk kesukarelaan namun sudah menjadi kewajiban. Secara faktual CSR bukan lagi menjadi tindakan "etis" dari sebuah perusahaan, tetapi lebih merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan perusahaan sebagai wujud dari tanggungjawab dampak negatif yang timbul dari pembangunan ekonomi terhadap lingkungannya (Azheri & Wahyudi, 2011, h. xxii).

Kemudian pertanyaannya apa hubungan praktik CSR dengan lembaga donor dan LSM? Data di lapangan menyebutkan, sebagian uang yang masuk ke lembaga donor merupakan uang dari perusahaan besar yang berasal dari Amerika dan Eropa. Semua itu tergantung dari mana asal lembaga donor. Perusahan-perusahaan besar dari kedua benua tersebut, Amerika dan Eropa, menyisihkan sebagian dananya untuk program amal, kemudian diberikan pada lembaga donor agar penyalurannya tepat sasaran. Tidak sedikit di antaranya merupakan uang dari program CSR. Memang pada kenyataannya tidak semua uang donor adalah uang dari program CSR. Ada banyak penyumbang, baik itu, lembaga amal yang mengumpulkan uang dari individu atau orang kaya dari masyarakat sipil, pemerintah, maupun korporat.

Sementara kebanyakan dari LSM di Indonesia sangat menggantungkan hidupnya pada lembaga donor. LSM-LSM ini tidak mampu membiayai program mereka sendiri. Sangat jarang LSM-LSM yang mampu hidup mandiri. Ketergantungan yang sangat besar pada lembaga donor menyebabkan hidup matinya suatu LSM di Indonesia tergantung pada lembaga donor. Hal ini semakin memuluskan dominasi lembaga donor pada suatu LSM.

Lembaga donor tidak hanya diartikan semata-mata sebagai organisiasi pembawa kebaikan. Lembaga donor tidak datang dengan segudang uang tanpa kepentingan. Lembaga donor bukanlah entitas tunggal dengan satu misi, visi dan ideologi. Menurut Hancock (2007:vii), lembaga donor tidak lebih sebagai bisnis bantuan yang sama sekali tidak membantu masyarakat dan negara miskin. Mereka justru masuk perangkap yang jauh lebih parah. Lembaga donor tidak lebih sebagai "alat penghisap darah rakyat". Ini menujukan adanya penjajahan dalam bentuk baru atau biasa disebut neokolonialisme.

Neokolonialisme adalah babak baru dari kolonialisme, bentuk sistem penjajahan dan penguasaan ala barat. Kalau dahulu kita mengenal istilah kolonialisme sebagai bentuk penguasaan barat terhadap negara terjajah (negara dunia ketiga) melalui kekerasan, penguasaan tanah, dan rempah-rempah serta perbudakan. Kini penjajahan hadir dalam wajah baru yakni neokolonialisme, namun visi, misi dan ideologi masih tatap sama yaitu hasrat untuk menguasai negara Dunia Ketiga. Neokolonalisme adalah bentuk penjajahan secara

halus (tidak dengan kekerasan dan paksaan) dan meyeluruh baik ekonomi, budaya dan bukan tidak mungkin mengarah pada politik (Loomba, 2003, h. 9).

Dana CSR perusahaan yang dialirkan melalui lembaga donor dan kemudian masuk pada LSM bukan tidak mungkin menjadi salah satu dari strategi bisnis perusahaan. Kedekatan masyarakat pada LSM menjadi jalan pintas yang sangat memungkinkan untuk menebarkan "benih-benih" kapitalisme. LSM dijadikan perpanjangan tangan perusahaan besar untuk semakin menyamankan kedudukan kapitalisme. Kehadiran *New Social Mevement* (NSM) atau gerakan sosial baru semakin mengukuhkan anggapan itu. Menurut Rajendara Sing (Fauzi, 2005, h. 11), gerakan NSM tidak meneriakkan dirinya pada wacana ideologis yang meneriakan anti kapitaslisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas.

Bergabungnya kekuatan besar tersebut yang melanggengkan kuasa kapitalisme, yakni korporat besar dengan strategi CSR-nya, lembaga donor dengan uang bantuanya, serta LSM dengan dengan kedekatannya pada masyarakat akar rumput merupakan suatu ciri neoliberalisme. Menurut Wibowo (Saksono, 2009, h. 137), kehadiran neoliberalisme tidak hanya dirasakan pada bidang ekonomi saja, namun dapat dirasakan hingga seluruh sendi kehidupan masyarakat hingga pelosok dunia. Neoliberalisme melalui dukungan komputer, teknologi yang canggih serta kekuatan kapitalis lokal yang bergabung dengan kapitalis global, bersama-sama mengeruk kekayaan bumi sembari menjanjikan kemakmuran global yang tidak kunjung datang.

Segala isu program kerja LSM yang dikumandangkan oleh lembaga donor selalu terkait dengan demokratisasi negara. Misalnya undang-undang keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan program salah satu LSM di Yogyakarta didanai oleh Tifa yang merupakan yayasan donor yang mendapat dana dari *Open Society* lembaga milik pengusaha Amerika Serikat, George Sorros. Undang-undang tentang KIP mengharuskan segala sesuatu yang terkait dengan lembaga milik publik harus transparan dan terbuka pada khalayak umum. Baik itu soal informasi keuangan, program, dan semua hal yang menyangkut kepentingan publik. Hal ini merupakan cerminan dari demokrasi.

Demokratisasi yang dibawa oleh Barat, khususnya oleh lembaga donor ke Indonesia tak lepas dari segala diskursus orientalisme sebagaimana yang dipopulerkan Edward Said (2010). Orientalisme merupakan suatu paham bagaimana cara pandang bangsa barat terhadap bangsa timur. Bangsa timur tidak dipandang dengan apa adanya, namun dipandang bagaimana mereka harus ditata dan diatur sebagaimana 'harusnya'. Orang-orang timur dianggap orang yang lemah, tidak rasional, menyimpang, tradisional serta inferior. Untuk itu perlu "diajari". Melalui para *Indolog* dengan karya-karyanya, penelitian-penelitian tentang timur, justru malah mempertegas kedudukan rendah masyarakat timur (Samuel, 2010, h. 35)

Menurut Said (2010, h. xix), melalui pengetahuan yang didapat dengan usaha pemahaman, studi, dan analisis; masyarakat barat terutama AS mempunyai kehendak untuk menguasai, mendominasi dunia, serta menjarah sumber daya alam yang langka. Selajutnya Said menegaskan bahwa penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Barat terhadap dunia timur menciptakan lanskap kering yang dapat digunakan oleh pemerintah Amerika untuk mengkonstruksi suatu model "demokrasi" pasar bebas.

Cerita ini memang tidak asing lagi, karena memang pada awal kemunculannya, LSM-LSM di Indonesia yang didanai oleh lembaga dana asing selalu menyuarakan demokratisasi. Sejak dekade 1980-an muncul sebuah skema pendanaan dan akan fokus pada upaya-upaya mewujudkan suatu negara yang demokrasi. Sementara itu negara-negara di Dunia Ketiga percaya bahwa negara yang demokratis akan mudah mendapatkan mitra kerja ekonomi maupun politik (Widjajanto, 2007, h. 90-91).

Demokrasi yang dikumandangkan oleh lembaga dana asing tidak hanya sebatas pemilu yang bebas, jujur dan adil serta kebebasan berpolitik dan kebebasan sipil. Tapi lebih dari itu, isu tentang demokratisasi merupakan langkah awal menuju liberalisme. Menurut Widjajanto (2007, h. 90), demokratisasi dilihat sebagai sebuah upaya penyebaran pengaruh ideologi liberal ke berbagai negara di dunia. Ditambahkan oleh Pontoh (2005, h. xvi), di Indonesia, perpindahan idologi politik diktator rezim Orde Baru ke rezim reformasi telah berubah arah, bukan lagi transisi menuju domokrasi, melainkan transisi menuju neoliberalisme. Hal ini karena faktor internasional yang dominan seperti kekuatan modal asing semacam IMF, *Word Bank*, dan perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat.

Kebebasan rakyat dengan hak suara yang dimiliki hanya dibutuhkan ketika pemilu saja. Selebihnya rakyat dikhianati, ditipu, kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat. Justru sebaliknya, kebijakan hanya diperuntukkan untuk para penguasa dan para birokrat, yang ironisnya justru mereka dipilih oleh rakyat. Menurut Mulgan (Pontoh, 2005, h. viii), prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan, dan kompetisi telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berbisnis bagi pemilik modal, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan nasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas, yang kesemuanya adalah watak noeliberalisme.

Kekuatan politik yang bergabung dengan kekuatan modal telah menjadikan kuasa neoliberalisme tak terbendung. Sistem demokrasi saat ini hanya melayani kekuasaan oligarki. Penguasaan “si kaya” pada “si miskin” . Kekuasaan hanya berpindah-pindah pada segelintir elit oligarki itu-itu saja. Relasi antara kekuatan politik dan kekuatan modal dihidupkan oleh demokrasi prosedural. Demokrasi yang hanya sebatas penciptaan lembaga saja. Sistem demokrasi yang demikian justru menghasilkan keputusan-keputusan menganiaya rakyat, sebaliknya cukup menguntungkan neolibrealisme. Misalnya, proyek privatisasi telah menciptakkan program pendidikan dan biaya kesehatan yang mahal. Tentu itu sangat memberatkan rakyat, namun bagi pemilik modal justru menjadi lahan bisnis yang menarik dengan mendirikan rumah sakit serta lembaga pendidikan. Contoh lain adalah peraturan daerah pada sistem tata kota, setiap pedagang kaki lima dan perumahan kumuh digusur karena dianggap sebagai biang utama masalah perkotaan. Lebih pilunya lagi lembaga hukum hanya berperan sebagai alat penyeleksi kawasan dan turut menetapkan kawasan tertentu sebagai larangan. Sementara tempat tersebut kemudian dibangun gedung-gedung mewah sepertu perkantoran, mall, dan perumahan serta apartemen-apartemen elite (Pontoh, 2005, h. 169).

Sudah tidak diragukan lagi bahwa melalui aturan, regulasi serta kelonggaran negara yang dibuat untuk memudahkan para pebisnis dan pemilik modal untuk berbisnis adalah prinsip dasar yang semakin memuluskan laju neolebralisme. Menurut nabinya para neoliberal,

Friedrich August von Hayek (Pontoh, 2005, h. 22), peran negara bukan untuk mengintervensi *spontaneous order* yang muncul dalam pasar, sebaliknya peran negara justru melindungi *spontaneous order* tersebut dari intervensi manusia baik itu politisi dan kelompok-kelompok kepentingan seperti serikat buruh. Konsekuensinya, bila menganut perspektif Weberian ("pasar" dan "negara"), jika ingin kekuatan pasar bekerja harus diupayakan agar negara semakin melemah dan hanya berfungsi sebagai legulator, karena pengaturan negara bertentangan dengan konsep noelibelalisme.

Dampak dari tumbuhnya neoliberalisme ini adalah menjamurnya perusahaan-perusahaan berbasis multinasional di dunia. Merurut Wibowo (2004, h. 3), salah satu faktor munculnya neoliberalisme adalah kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional sebagai kekuatan besar yang rata-rata mempunyai kantor pusat di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Australia.

Pertanyaannya, apakah benar neoliberalisme memang membawa kemakmuran? Jawabannya tidak. Dengan janji-janji para kapitalis bahwa dengan paham neoliberalisme akan membawa kemakmuran global lebih cepat dari yang diinginkan, tapi kenyataanya adalah sebaliknya. Neolibralime hanya menghasilkan ketimpangan-ketimpangan ekonomi. Hanya ada seperlima penduduk dunia yang menikmati hasil dari 80% pendapatan dunia. Sementara yang lain hidup dibawah kemiskinan. Dunia ini tidak menjadi lebih makmur apa lagi adil semata-mata karena kapitalime yang menjelma menjadi neoliberalisme (Wibowo & Wahono, 2004, h. 3).

Karena itu ditegaskan Hancock:

> "Sangatlah mungkin bila bisnis bantuan pembangunan negara-negara barat itu merupakan penghalang nyata bagi usaha-usaha masyarakat miskin untuk lebih produktif. Bisnis bantuan pembangunan tersebut juga merupakan sebuah pengingkaran potensi rakyat miskin dan merupakan sebuah penghinaan (lewat pendiktean) negara-negara kaya terhadap keunikan dan kemampuan negara miskin yang belum mereka sungguh-sungguh kenal".
>
> (2007:357)

Penutup

Lembaga donor malalui pewacanaan isu dapat bertindak dan memosisikan sebagai aktor lebih superior dan sangat dominan. Melalui pengetahuan tentang isu dan skema pendanaan, lembaga donor menebar kuasanya pada LSM. Sementara LSM sebagai lembaga subordinat dengan pengetahuan yang tidak berimbang, hanya akan berusaha mencocokan tanpa ada pertanyaan yang kritis. Relasi antara lembaga donor dan LSM banyak dilakukan atas nama demokratisasi. Pengetahuan lembaga donor tentang idiologi demokrasi dijadikan alat untuk menggelar kuasa-kuasa pada masyarakat sipil. Sementara LSM dengan pengetahuan yang sangat timpang, hanya menjadi perpanjang tangan dari lembaga donor untuk menyebarkan isu demokratisasi. Melalui monitoring dan evaluasi, langka ini dijadikan sebagai alat pendisiplinan kerja pada LSM. Agar kerja LSM dapat dinormalisasikan serta dikontrol, maka lembaga donor menerapkan pemantauan atau *panopticon* melalui monitoring dan evaluasi.

CRS perusahaan tidak hanya sebatas tindakan *filantropis* semata. Kini CSR sudah menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan kapitalis. Lembaga donor dengan

mewacanakan isu demokratisasi yang kegiatanya di jalankan oleh LSM, merupakan upaya penyebaran idiologi neoliberalisme, karena domokratisasi adalah roda idiologis yang menggerakan kapitalisme, moderenisme dan materialisme. Melalui bantuan lembaga donor ke LSM terjadi praktik neokolonialisme. Dengan kedok bantuan pada masyarakat negara miskin, negara dunia pertama berusaha menguasai dan menjajah dunia ketiga agar tunduk dan patuh pada ideologi mereka. Hal ini menegaskan bahwa neokolonialisme kini berjalan melalui penguasaan atas aset di suatu negara dan dapat berjalan mulus melalui CSR yang digelontorkan pada sejumlah LSM dengan kontrol dari lembaga pendonor.

Daftar pustaka

Audifax. 2008. *Research*: *Sebuah Pengantar untuk Mencari-Ulang Metode Penelitian dalam Psikologi.* Yogyakarta: Jalasutra.

Bertense, K. 2006. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gremedia Pusta Utama.

Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Editor, Jordan, Lisa, Tuijl Peter Van. 2009. *Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip & Inovasi.* Jakarta: LP3ES.

Fakih, Mansour. 2010. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM.* Yogyakarta: Insist Press

Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga.* Yogyakarta: Insist Press

Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-modernisme.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, Lexi J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.

Poerwanto. 2010. *Corporate Social Responsbility: Menjinakan Gejolak Sosial di Era pornoografi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pontoh, Coen Husain. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar.* Yogyakarta: Resist Book

Santoso, Listiyono, dkk. 2007. *Seri Pemikiran Tokoh: Epistemologi Kiri.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sarup, Madan. 2011. *Panduan Pengantar Untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodrenisme*. Yogyakarta: Jalasutra

Widjajanto, Andi. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yokyakarta: LKiS Pelangi Nusantara Yogyakarta.

2003. *Direktori Peacebuilding Indonesia: Indonesian Peacebulding.* Yogyakarta: Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Atmajaya

Widjaja, Gunawan & Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR.* Jakarta: Penebar Swadaya.

Wahyudi, Isa & Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Respobsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi.* Malang: Setara Press.

Saksono, Ign. Gatut. 2009. *Noeliberalisme vs Sosialisme: Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan.* Yogyakarta: Forkoma PMKRI

Said, Edward W. 2010. *Oriaentalisme: Menggugat Hegemoni dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hardiyanta, Sunu. 1997. *Disiplin Tubuh; Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: Lkis